

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggriani, Jum. 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dwiyanto, Agus. 2015, *Administrasi Publik: Desentralisasi, Kelembagaan, dan Aparatur Sipil Negara*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fahmal, A.Muin. 2006, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintah yang bersih*, Yogyakarta: UII Press.
- Fauzan, Muhammad, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah – Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, Yogyakarta: UII Press
- HS, Salim dan Elies Septiana Nurbani. 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Kartono, 2021, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang*, Banyumas: SIP Publishing
- Kuncoro, Mudrajat. 2014, *Otonomi Daerah Menuju Era Pembangunan Daerah*, Edisi 3, Jakarta: Erlangga.
- Laoly, Yasonna Hamonangan, *Birokrasi Digital*, 2019, Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet
- Makawimbang, Hernold Ferry.2015, “*Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*”, Bantul: Thafa Media.
- Marbun, SF., dan Diana Halim Koentjoro dkk., 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Nasution, Emharri Manda. 2014, *Komunikasi Audit Intern II*, Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- Nawawi, Hadari. 1992, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Erlangga.
- Nugroho HP, Kunto, 2016, *Integritas – Revolusi Mental*, Kendal: Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

- Nurharyoko, Gogor Oko, dkk, 2020. *Inovasi Birokrasi: Membuat Kerja Birokrat Lebih Bermakna*, Jakarta: Gramedia.
- Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, 1971, *Bureaucracy in Modern Society*, diterjemahkan oleh Gary Rachman Yusuf, 1987, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern (Terjemahan)*, Jakarta: UI Press.
- Pudjiyanto, Widodo Sigit. 2019, *Pendekatan Baru Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Putro, R. Mauro Nugroho. 2014, *Kode Etik dan Standar Audit Intern*, Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Rajawali Press.
- Santosa, Hendri, 2019, *Mencegah Korupsi di Lingkungan Birokrasi*, Citra Mandiri Utama, Semarang,
- Sedarmayanti, 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah, Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Bandung: Mandar Maju.
- Soebechi Imam, dan Supandi dkk. 2014, *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Press.
- Sudrajat, Tedi, 2017, *Hukum Birokrasi Pemerintahan Kewenangan dan Jabatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 52
- Syafiie, Inu Kencana. 2013, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara.

B. Jurnal/Makalah

- Achmad Fauzi, *Peran Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai Lembaga Pengawasan Internal Pemerintahan Daerah Menuju Tata Pemerintahan Daerah yang Baik*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 10, Nomor 2, April 2013.
- Andry Lauda, *Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*, Jurnal Supremasi, Volume 8 Nomor 2, September 2018.
- Disiplin F. Manao, *Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintahan dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan dengan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 2, Nomor 1, Maret 2018.

Heri Hartanto dan Zaki Adhitya, makalah bahan seminar “*Pencegahan Korupsi dengan Menerapkan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dalam Pemerintahan*”, Disampaikan dalam Seminar Nasional *Call For Papers*, Tema Seminar: Peran Perguruan Tinggi Dalam Upaya Penanggulangan Korupsi, Selasa, 23 Mei 2017 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Muchsan, 1999, *Perwujudan Pemerintah yang bersih dan Berwibawa dalam Negara Kesejahteraan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal. 2. (tidak diterbitkan)

Muhammad Fauzan, *Peluang Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Provinsi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Jilid 23, Terbitan 1, Maret 2016.

Putra Astomo, *Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 64, Th. XVI, Desember 2014.

Rini, Nicken Sarwo, *Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 2, Juni 2018.

Sukardi, *Wewenang Pembatalan Peraturan Daerah*, Jurnal Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume XII, Nomor 3, Maret 2013.

Tedi Sudrajat, *Perwujudan Good Governance melalui Format Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Dinamika Hukum, Jilid 9, Terbitan 2, Mei 2009.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292)

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9)

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 56)

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

D. Internet

<https://jatengprov.go.id/publik/inspektorat-jateng-terbaik-nasional-kpk-beriselamat-ke-ganjar/>, diakses 1 November 2020.

<https://stranaspk.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-triwulan/laporan-stranas-pencegahan-korupsi-triwulan-vi-2020>, diakses 3 November 2020.

<https://korsupgah.kpk.go.id/beranda/korsupgah/2019>, diakses 5 November 2020.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/berita/aparatur-sipil-negara-harus-dilindungi->, diakses pada 15 Maret 2021.

E. Wawancara

Wawancara dengan Inspektur Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Bapak Hendri Santosa

Wawancara dengan Sekretaris Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Bapak Nur Rohmat

Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Ibu Sri Rahayuningsih

F. Lain-Lain

Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Semester 2
Tahun 2018

Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Semester 2
Tahun 2019

Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Semester 2
Tahun 2020